



# **ANALISIS MAKRO EKONOMI 2020**

**BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Laporan Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2020. Analisis Makro Ekonomi DIY dimaksudkan adalah untuk menyediakan data dan analisis ekonomi DIY secara makro dalam perencanaan pembangunan. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kondisi ekonomi 2015-2019, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi; mengetahui angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2020-2021

Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah DIY sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah khususnya terkait dengan dampak epidemi Covid – 19. Penyusun mengharapkan masukan bagi perbaikan penyusunan analisis ini agar dapat melakukan perbaikan di kemudian hari.

Yogyakarta, Mei 2020

TIM BAPPEDA DIY

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud	2
1.3. Tujuan	2
1.4. Sasaran	2
1.5. Manfaat	2
1.6. Lingkup Pekerjaan	3
1.7. Keluaran	3
 BAB II LANDASAN TEORI	 4
2.1. Pertumbuhan Ekonomi	4
2.2. Inflasi	7
2.3. Tingkat Pengangguran	10
2.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	15
2.5. Distribusi Ekonomi	16
2.5.1. Indeks Gini	16
2.5.2. Indeks Williamson	19
2.6. Kemiskinan	19
 BAB III PERKEMBANGAN INDIKATR MAKROEKONOMI 2015 - 2019	 23
3.1. PDRB dan Struktur Ekonomi	23
3.2. Pertumbuhan Ekonomi	25
3.3. Struktur Pengeluaran dalam PDRB	26
3.4. Inflasi	27
3.5. ICOR	27
3.6. Ketenagakerjaan	28
3.7. Kemiskinan	29
3.8. Ketimpangan Regional	29
3.9. Ketimpangan Pendapatan	30
 BAB IV PROYEKSI INDIKATOR MAKROEKONOMI TAHUN 2020 DAN 2021	 31
4.1. Pertumbuhan Ekonomi	32
4.2. Inflasi	32
4.3. ICOR	33
4.4. TPT	33
4.5. Kemiskinan	34
4.6. Indeks Gini	34
4.7. Indeks Williamson	35

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	37
6.1. Kesimpulan	37
6.2. Rekomendasi	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi tujuan akhir dari proses pembangunan. Pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan akan selalu memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan baik. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang merupakan indikator meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat terwujud.

Proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila pemerintah melaksanakannya sesuai dengan arah dan perencanaan yang telah tersusun dengan baik. Penyusunan rencana ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan yang menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Seperti propinsi-propinsi yang lain, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan yang terlaksana. Untuk menjamin proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat. Hal ini merupakan langkah awal dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya nanti akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat DIY.

Ada beberapa rencana pembangunan yang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dalam periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam periode tahunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahun. Dokumen ini merupakan perwujudan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai

landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang akhirnya menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyusunan dokumen RKPD, dibutuhkan analisis ekonomi daerah yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah. Dalam rangka menyediakan materi analisis ekonomi tersebut, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga yang menyusun RKPD perlu untuk membuat kajian analisis ekonomi makro daerah.

## **1.2. Maksud**

Maksud dari pekerjaan penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY adalah untuk menyediakan data dan analisis ekonomi DIY secara makro dalam perencanaan pembangunan.

## **1.3. Tujuan**

1. Mengetahui dan menganalisis kondisi ekonomi 2015-2019, yang mencakup indikator makro ekonomi;
2. Mengetahui dan menganalisis angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2020-2021;

## **1.4. Sasaran**

Tersusunnya buku Analisis Makro Ekonomi DIY.

## **1.5. Manfaat**

Manfaat hasil Penyusunan Analisis Makro Ekonomi DIY adalah untuk menjadi salah satu dasar rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan di DIY.

### **1.6. Lingkup Pekerjaan**

1. Menganalisis kondisi ekonomi 2015-2019, yang mencakup indikator makro ekonomi;
2. Menyediakan angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2020-2021

### **1.7. Keluaran**

1. Hasil analisis kondisi ekonomi 2015-2019, yang mencakup indikator makro ekonomi;
2. Angka proyeksi indikator ekonomi DIY 2020-2021

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Mankiw, 2007: 186). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”. Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu : akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro dan Smith, 2012 : 104). Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia. Akumulasi modal ini terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan. Dengan demikian hal ini akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada pertumbuhan angkatan kerja yang merupakan sumber daya penting dalam proses produksi nasional. Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun modal dalam peningkatan proses produksi domestik.



Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

keterangan :

*PE* = Pertumbuhan ekonomi

*PDRB<sub>t</sub>* = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t

*PDRB<sub>(t-1)</sub>* = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya adalah jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (Mankiw, 2007:23-24).

Secara konseptual ada tiga macam pendekatan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

### **1. Pendekatan Produksi**

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dengan mendasari pada PDRB atas dasar harga konstan dikelompokkan dalam lapangan usaha (sektor), yaitu : (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, gas, (5) pengadaan air bersih (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan, (12) *real estate*, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (17) jasa lainnya.

### **2. Pendekatan Pengeluaran**

Produk Domestik Regional Bruto dalam pendekatan ini didefinisikan sebagai semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor) (lihat Bernanke, 2007;492-499).

### **3. Pendekatan Pendapatan**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; di mana besarnya adalah sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Selama ini, data PDRB yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan produksi (lapangan usaha) dan pendekatan pengeluaran (penggunaan). Pengumpulan data PDRB dilakukan sebagai berikut :

- Untuk PDRB sektoral, data dikumpulkan dari departemen/instansi terkait. Data yang dikumpulkan dari setiap sektor antara lain berupa data produksi, data harga di tingkat produsen, dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi, serta data pengeluaran, yang diperoleh baik melalui survei maupun estimasi.
- Untuk PDRB pengeluaran, data dikumpulkan departemen/instansi terkait yang secara resmi mengeluarkan data (seperti ekspor-impor, pengeluaran dan investasi pemerintah, serta investasi swasta) dan melalui survei-survei khusus (seperti survei khusus pengeluaran rumah tangga).

## 2.2. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) (Natsir, 2014: 253 ). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang domestik secara terus menerus. Inflasi dikatakan sebagai proses suatu peristiwa dan bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi, tetapi jika proses terjadi kenaikan harga yang terus menerus dan saling mempengaruhi, maka hal ini dianggap sebagai inflasi.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan (Natsir, 2014: 262), yaitu :

- a. inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun;
- b. inflasi sedang, yaitu antara 10%-30% setahun;
- c. inflasi berat, kenaikan harga berada antara 30%-100% setahun dan
- d. hiperinflasi atau inflasi tak terkendali jika kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Ada dua hal yang dapat menyebabkan inflasi (Natsir, 2014: 255), yaitu :

1. Inflasi karena tarikan permintaan (*Demand pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi karena akibat adanya permintaan total ( *agregat demand*) yang berlebihan. Biasanya ini dipicu oleh meningkatnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan menimbulkan kenaikan tingkat

harga. Kenaikan permintaan barang yang tidak seimbang dengan kenaikan penawaran akan mendorong harga naik sehingga terjadi inflasi. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa akan mengakibatkan bertambahnya faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Dengan demikian inflasi ini terjadi karena kenaikan permintaan agregat pada kondisi perekonomian *full employment*, di mana biasanya disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan.

2. Inflasi karena desakan biaya (*Cost push Inflation*)

Inflasi karena desakan biaya ini terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau termasuk juga kelangkaan distribusi, walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Ketidaklancaran distribusi atau dengan berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat mengakibatkan kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran. Berkurangnya produksi sendiri dapat terjadi karena beberapa hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi, bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi (penimbunan), dan sebagainya. Untuk faktor distribusi, faktor infrastruktur juga mempunyai peran yang sangat penting.

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan karena adanya guncangan di dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan perekonomian. Inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*), yaitu inflasi yang terjadi di dalam negeri yang diakibatkan oleh pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang –barang input produksi yang diimpor.

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada parah atau tidaknya inflasi. Jika inflasi ringan, akan memberikan dampak positif karena dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Di sisi lain, dalam kondisi inflasi yang parah, seperti terjadinya inflasi tidak terkendali (hiperinflasi), kondisi perekonomian akan menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang tidak bersemangat kerja, menabung atau berinvestasi dan memproduksi karena harga meningkat dengan cepat. Di bawah ini akan dijelaskan dampak inflasi terhadap pendapatan, alokasi faktor produksi dan output nasional.

a. Dampak terhadap Pendapatan (*Equity Effect*).

Dampak terhadap pendapatan sifatnya tidak sama, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan persentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

b. Dampak terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*).

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

c. Efek terhadap Output (*Output Effects*).

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong

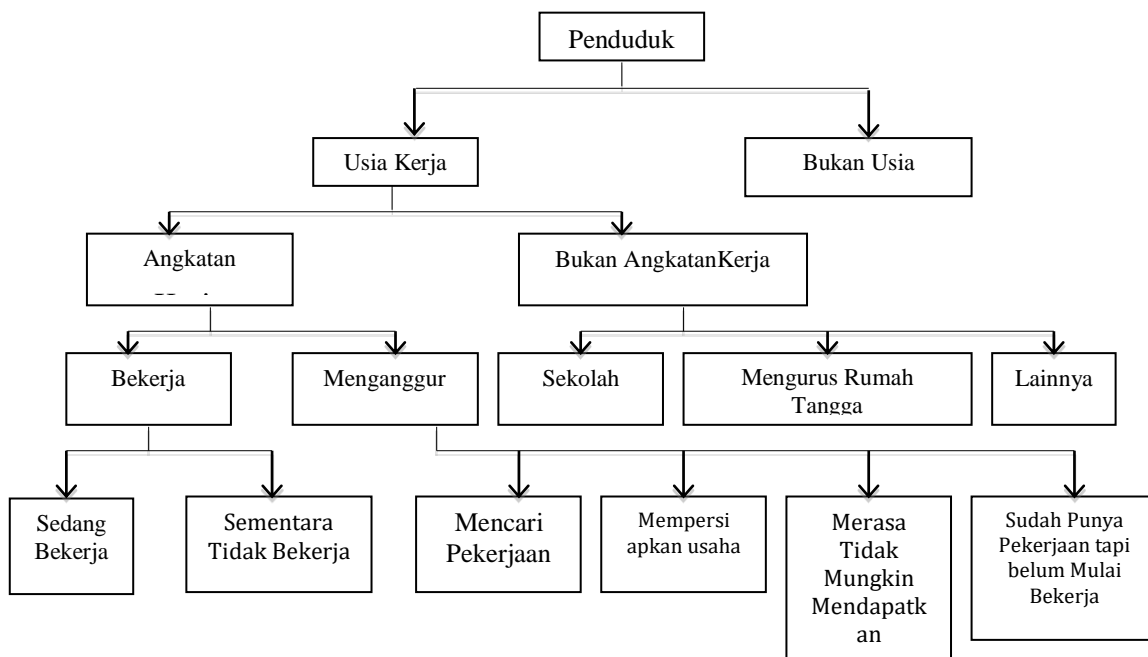
kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak mempunyai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

### 2.3. Tingkat Pengangguran

Pemahaman mengenai konsep ketenagakerjaan sangat penting untuk dapat mengidentifikasi penduduk yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja atau pengangguran.

Indikator-indikator ketenagakerjaan harus mempunyai konsep yang jelas dan tidak ambigu. Diperlukan suatu konsep dan definisi yang dapat membedakan antar indikator dengan indikator lainnya dengan batasan-batasan yang logis, bisa diterima secara umum dan berlaku untuk cakupan wilayah yang luas. Dalam rangka memudahkan pemahaman konsep dan definisi, diagram ketenagakerjaan berikut dapat membantu mengidentifikasi indikator-indikator ketenagakerjaan sebagaimana berikut.

**Gambar 2.1. Bagan Ketenagakerjaan**



**Gambar 2.1. Bagan Ketenagakerjaan**

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada *The Labour Force Concept* yang disarankan oleh *International Labour Organization* (ILO). Bagan ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pengertian masing-masing istilah ketenagakerjaan tersebut adalah:

A. *Penduduk Usia Kerja* adalah penduduk berumur lebih dari 15 tahun;

- *Penduduk yang termasuk angkatan kerja* adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan, akan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran;
- *Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja* adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
- *Bekerja* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi;
- *Pengangguran Terbuka* adalah Angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan, yang mencakup angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja;
- *Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja (have a job in future start)* adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Contoh :

- ❖ Pekerja tetap/pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan dan sebagainya;
- ❖ Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah);
- ❖ Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resiko sendiri dalam suatu bidang keahlian (pekerja profesional/mempunyai keahlian khusus), yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya.
- *Mencari pekerjaan (looking for work)* adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti:
  - ❖ Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
  - ❖ Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
  - ❖ Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih menunggu jawaban. Apabila sedang bekerja / dibebastugaskan baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai pengangguran;

- *Mempersiapkan Usaha (establishing a new bussiness/firm)* adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila "tindakan nyata", seperti mengumpulkan modal, perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus izin usaha dan sebagainya telah/sedang dilakukan;
- *Setengah Penganggur* adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur dibagi menjadi dua, yaitu:



- Setengah penganggur terpaksa adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan;
- Setengah penganggur sukarela adalah orang yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh waktu/ *part time worker* ).
- *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* adalah perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dan biasanya dinyatakan dalam persen;
- *Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)* adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, biasanya dinyatakan dalam persen;
- *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen;
- *Sekolah* adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
- *Mengurus rumah tangga* adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya, pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;
- *Kegiatan lainnya* adalah kegiatan seseorang selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga, termasuk di dalamnya mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti orang lanjut usia, cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi selama seminggu yang lalu;

- *Pendidikan tertinggi yang ditamatkan* adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
- *Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan* adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya. Untuk pembantu rumah tangga yang melakukan pekerjaan yang terus menerus di dalam rumah tangga dihitung banyaknya jam kerja sehari rata-rata 12 jam;
- *Lapangan usaha* adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/ perusahaan/kantor seseorang bekerja. Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 18 kategori tetapi dalam penyajian data/publikasinya menggunakan sembilan kategori/sektor yaitu:
  1. Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan;
  2. Pertambangan dan penggalian;
  3. Industri pengolahan;
  4. Listrik, gas dan air;
  5. Bangunan/konstruksi;
  6. Pedagang besar, eceran, rumah makan dan hotel;
  7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
  8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan; dan
  9. Jasa kemasyarakatan.
- *Jenis pekerjaan/jabatan* adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara tidak bekerja. Jenis/jabatan pekerjaan dibagi dalam 8 golongan besar

- *Upah/gaji bersih* adalah penerimaan buruh/karyawan yang biasanya diterima selama sebulan, berupa uang atau barang, yang dibayarkan melalui perusahaan/kantor/majikan. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan lainnya;
- *Status pekerjaan* adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori,

#### 2.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Investasi pada dasarnya akan mempengaruhi jumlah barang modal, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah output yang dihasilkan. Besarnya investasi pada periode ini di daerah akan berpengaruh pada besarnya pendapatan daerah di tahun yang akan datang. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan : berapakah kebutuhan investasi di daerah jika PDRB ditargetkan tumbuh sebesar x persen?, yaitu dapat diketahui dengan menggunakan ICOR.

The *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). ICOR dihitung dengan data-data tahun lalu pada harga konstan. Jika mempunyai data ICOR dalam rentang waktu yang relatif panjang, maka rata-ratanya dapat digunakan untuk mengestimasi kebutuhan total investasi dalam mewujudkan suatu target pertumbuhan tertentu atau tingkat pertumbuhan output (PDRB) yang akan dihasilkan dari besaran investasi tertentu. Misalkan diasumsikan bahwa kelambanan antara investasi dan kenaikan output adalah satu periode, maka ICOR dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Semakin rendah rasio tersebut maka semakin tinggi efisiensi investasi (Arsyad, 2010 : 186).

Untuk perekonomian secara agregat

$$ICOR = \frac{I_{t-1}}{(GDP_t - GDP_{t-1})}$$

Untuk sektor atau industri i

$$ICOR_i = \frac{I_{t-1}}{(Output_{i,t} - Output_{i,t-1})}$$

Di mana  $I_t$  adalah investasi (bruto) pada periode  $t$ .

Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan tentang rasio tersebut :

1. Walaupun ada hubungan yang kuat antara investasi dan output, tetapi pertumbuhan output tidak hanya dipengaruhi oleh investasi, tetapi juga variabel-variabel lainnya, seperti : pertumbuhan dan produktivitas, utilisasi dan kapasitas produksi.
2. Kaitan antara investasi dengan peningkatan output umumnya tidak bersifat seketika. Ada faktor kelambanan(lag) 'investasi meningkatkan output', yang besarnya bervariasi antar waktu maupun antar sektor. Dengan demikian untuk mendapatkan nilai ICOR yang lebih *reliable*, pemerintah daerah harus menghitung data ICOR untuk jangka waktu yang relatif lama, misalnya 30 (tigapuluh) tahun atau 40 (empat puluh) tahun terakhir.

Cara yang lebih pragmatis untuk mendapatkan nilai ICOR dalam jangka waktu yang relatif panjang adalah dengan menggunakan formula di bawah ini. Untuk rumus yang di bawah, nilai ICOR dapat dihitung dari rasio antara rerata pangsa investasi pada PDRB dengan rerata pertumbuhan PDRB saja.

Cara pragmatis untuk menghitung ICOR jangka panjang :

$$ICOR_{t,0} = \sum_0^{t-1} I / (PDRB_t - PDRB_0)$$

Metode menghitung ICOR dengan cara yang cepat

$$ICOR = \frac{\text{Rata - rata tahunan pangsa Investasi terhadap PDRB}}{\text{Rata - rata tahunan pertumbuhan PDRB}}$$

## 2.5. Distribusi Ekonomi

### 2.5.1. Indeks Gini

Koefisien Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Kurva ini diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Tahun 1905, ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemeraan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Indeks Gini. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut (Arsyad, 2010: 290) :

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k f_i(Y_{i+1} + Y_i)$$

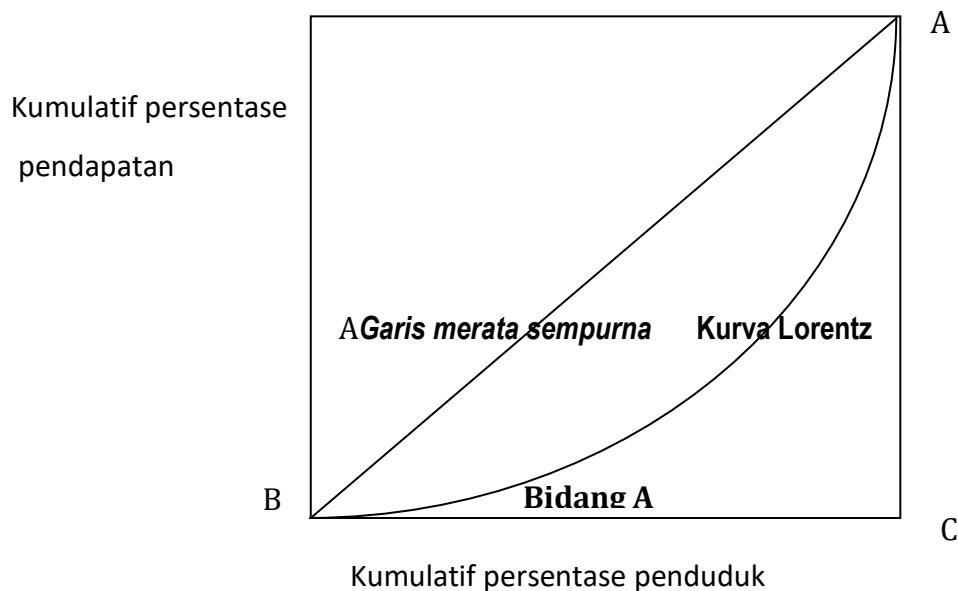
Mempunyai rentang nilai  $0 < IG < 1$ .

Keterangan:

$f_i$  = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif kelas  $i$

$Y_i$  = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas  $i$

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.



$$\text{Gini Ratio} = \text{Luas Bidang A} / \text{Segi tiga ABC.}$$

**Gambar 2.2. Kurva Lorentz**

Dari hasil penelitian di negara sedang berkembang, terutama di negara-negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditunjukkan adanya kecenderungan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan produk domestik bruto, atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Dari fakta tersebut, muncul pertanyaan: mengapa terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk berapa lama? Kerangka pemikiran ini yang melandasi Hipotesis Kuznets, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Artinya, dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, namun dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Dalam teori ekonomi hal ini dikenal dengan nama “Kurva U terbalik dari Hipotesis Kuznets”. Namun, hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa studi yang mengambil data *time series* membuktikan bahwa dalam beberapa negara yang masih bertumpu pada sektor pertanian (*rural economy*) menunjukkan hubungan negatif. Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets. Pemahaman atas variabel-variabel tersebut

akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak identik dengan kemiskinan atau mungkin lebih tepatnya adalah kesejahteraan pun bisa meningkat di negara-negara yang berbasis pertanian.

### 2.5.2. Indeks Williamson

Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah (regional) adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan oleh Jeffry G. Williamson (1965). Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketimpangan yang rendah jika nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35. Ketimpangan dengan taraf sedang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson antara 0,35 hingga 0,5. Sedangkan, daerah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Ketimpangan atau kesenjangan tersebut terjadi di daerah tingkat di bawahnya. Misalnya, Indeks Williamson provinsi menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Formula indeks Williamson dapat ditulis sebagai berikut (Arsyad, 2010: 294):

$$IW = \sqrt{\frac{\sum_i (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}}$$

Mempunyai rentang nilai  $0 < IW < 1$ .

Keterangan:

$IW$  = Indeks Williamson

$Y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota  $i$

$Y$  = PDRB per kapita Provinsi

$f_i$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota  $i$

$n$  = Jumlah penduduk Provinsi

## 2.6. Kemiskinan

Tujuan dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang merata, maka diharapkan akan mengurangi masalah kemiskinan. Di dunia ilmiah, masalah kemiskinan ini telah banyak ditelaah oleh para ilmuwan sosial dari berbagai

latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep dan ukuran untuk menandai berbagai aspek dari permasalahan tersebut.

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Dalam arti, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2010: 112).

Cara sederhana untuk mengukur jumlah kemiskinan adalah dengan menghitung jumlah kemiskinan dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Cara yang lazim disebut dengan *Head Count Index* ini sangat bermanfaat meskipun indikator ini sering dikritik karena mengabaikan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Meier (1995) mengatakan bahwa untuk mengatasi kelemahan *Head Count Index* dapat digunakan dengan ukuran kesenjangan kemiskinan pendapatan atau *poverty gap*.

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

#### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut menggunakan pendekatan dengan mengidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Konsep kemiskinan absolut ini sering dikaitkan dengan sebuah perkiraan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum yang merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.



## 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dapat dikatakan bahwa kemiskinan relatif sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

### 2.6.1. Garis Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minuman makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari. Pengeluaran kebutuhan bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan demikian BPS menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *Head Count Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan (Kuncoro, 2006:115).

### 2.6.2. Garis Kemiskinan Lainnya

Garis kemiskinan lain yang dikenal adalah garis kemiskinan Profesor Sajogyo, di mana menggunakan garis kemiskinan yang didasarkan pada harga beras. Didefinisikan bahwa batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Dengan kata lain, garis kemiskinan versi Sajogyo adalah nilai rupiah yang setara dengan 20 kg beras untuk daerah perdesaan dan 30 kg beras untuk perkotaan. Pendekatan ini memiliki kelemahan mendasar yaitu tidak mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil. Ada dua hal yang dikritik dari pendekatan Sajogyo ini, yaitu : (1) mengandalkan pada satu harga (beras), dan (2) meskipun beras adalah makanan pokok sebagian orang Indonesia, porsinya dalam anggaran keluarga, bahkan dalam keluarga miskin menurun secara cepat.

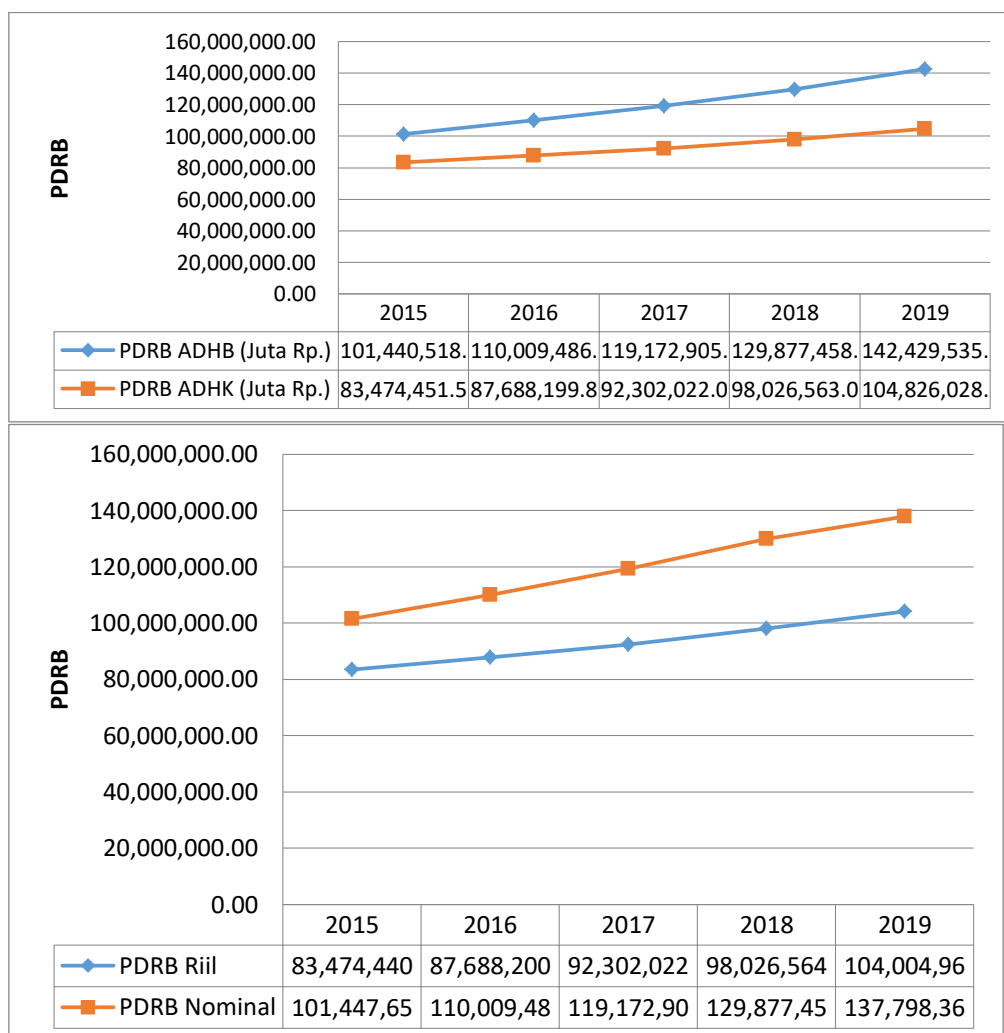
Garis kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Profesor Hendra Esmara, yaitu dengan mencoba menetapkan suatu garis kemiskinan perdesaan dan perkotaan yang dilihat dari sudut pengeluaran aktual pada sekelompok barang dan jasa esensial seperti yang diungkapkan secara berturut-turut dalam Susenas. Ukuran Esmara mampu menangkap dampak inflasi maupun dampak pendapatan riil yang meningkat terhadap kuantitas barang esensial yang dikonsumsi. Ukuran Esmara ini meningkat lebih cepat daripada ukuran BPS maupun Sajogyo (Kuncoro, 2006:119).

## BAB III

### PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKROEKONOMI 2015 - 2019

#### 3.1. PDRB dan Struktur Ekonomi

5144737919

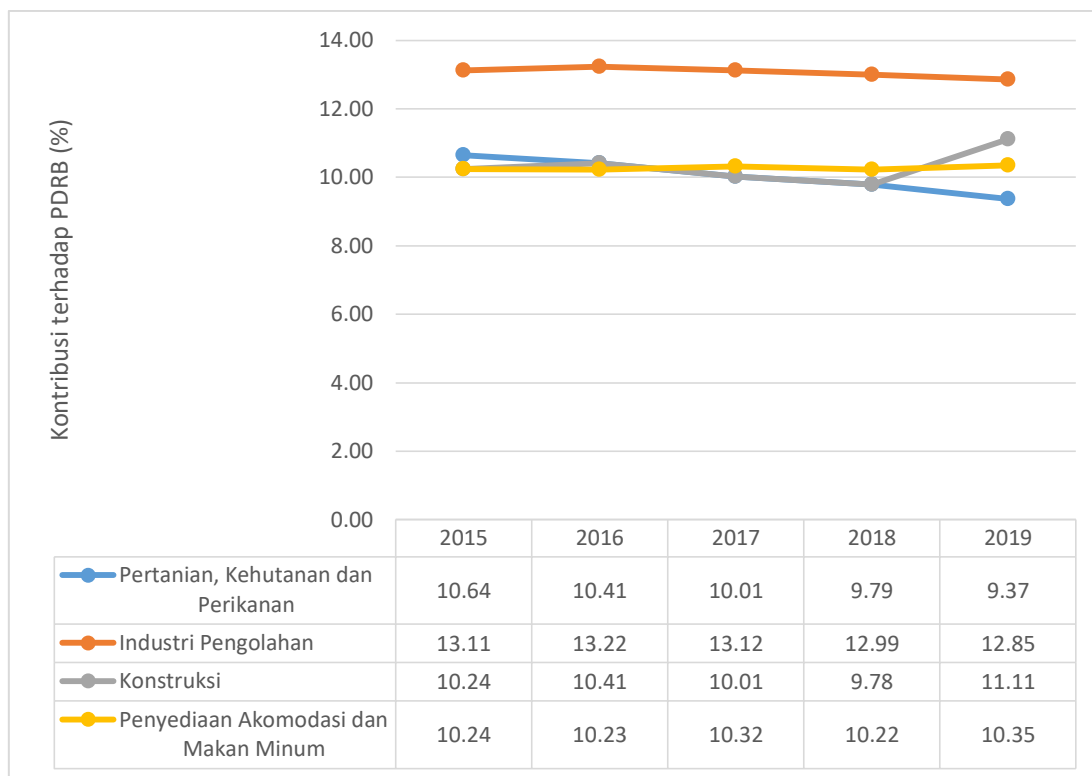


Sumber: BPS Provinsi DIY

**Gambar 0-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2015-2019**

adalah s5351113 Sementara itu kontribusi sektor konstruksi meningkat di tahun 2018 dan 2019Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 12,83%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 10,46%, sektor konstruksi 10,26%

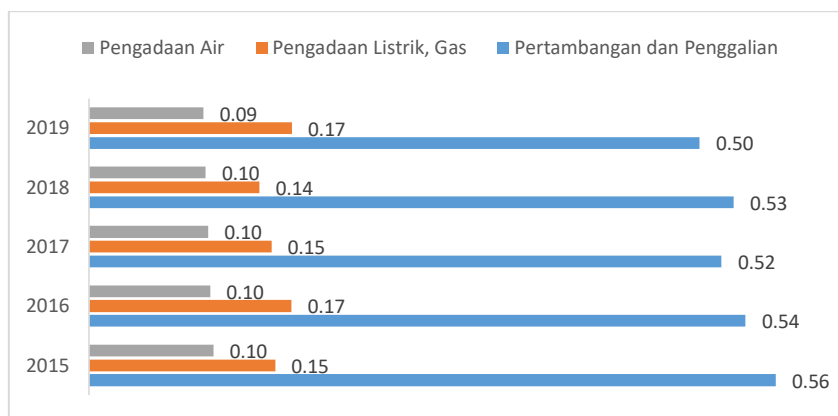
serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,57%. Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan.



Sumber : BPS Provinsi DIY

**Gambar 0-2 Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015 - 2019**

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu,

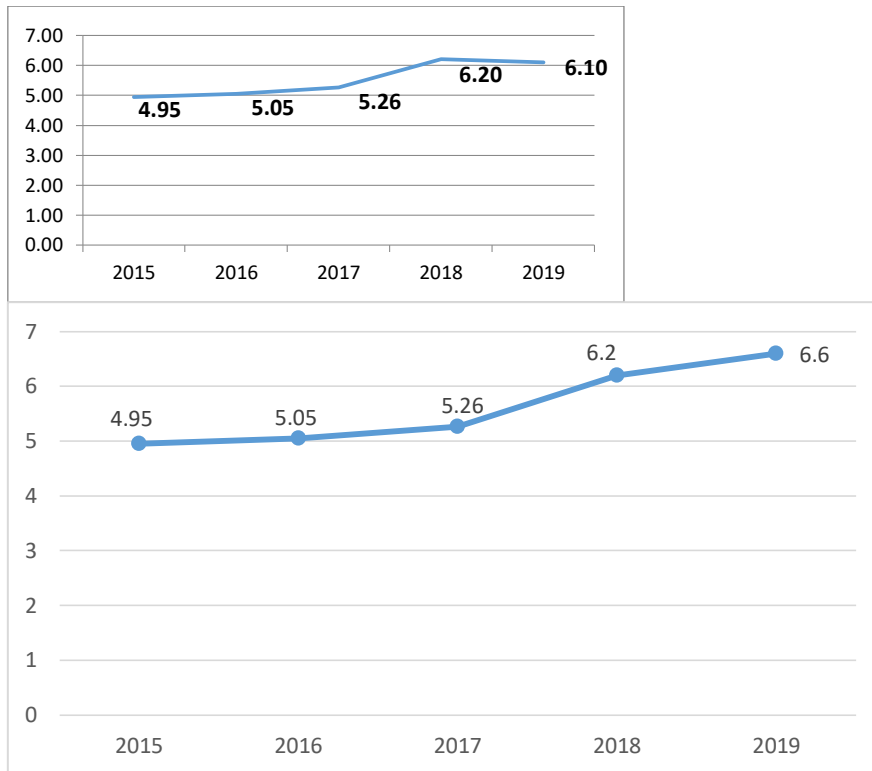


Sumber : BPS Provinsi DIY

**Gambar 0-3 Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), Tahun 2015-2019**

### 3.2. Pertumbuhan Ekonomi

19akhir periodeadalah 6,6Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.

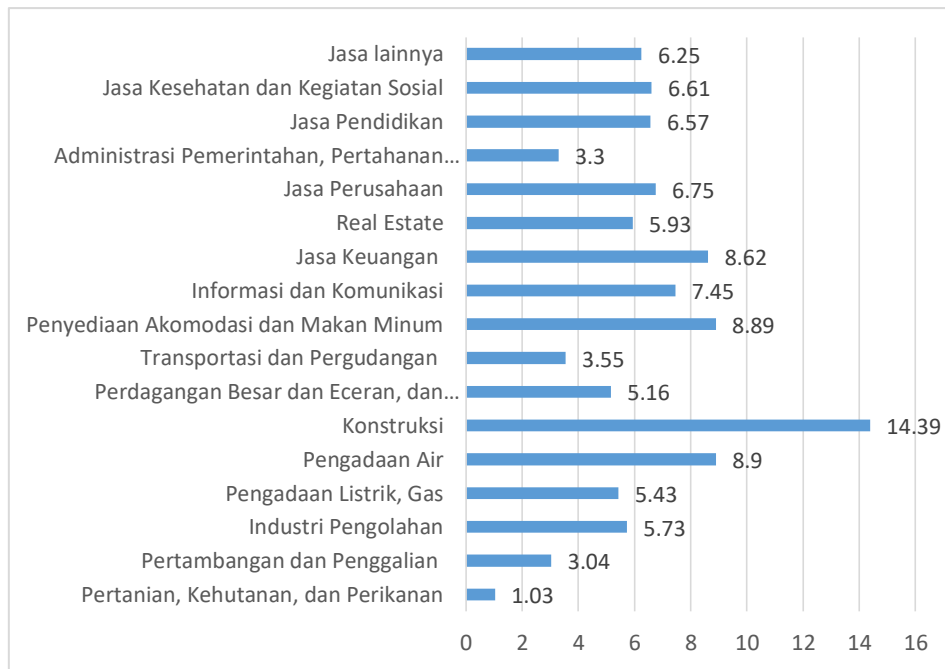


Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

**Gambar 0-4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019**

dengan pertumbuhan sebesar 14,39%.



Sumber: Gambar 0-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2019 (%)

### 3.3. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

593059249955539530989959 57219725858898,970

**Tabel 0-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	68.730.528	74.429.796	81.688.214	86.753.197	92.459.989
Konsumsi LNPRT	3.171.193	3.220.070	3.756.395	4.095.046	4.613.732
Konsumsi pemerintah	17.214.154	18.441.762	20.063.072	21.346.113	22.458.454
PMTB	30.798.881	33.428.978	37.147.936	43.173.678	49.519.128
Perubahan Inventori	1.151.797	1.295.788	1.368.184	1.435.491	1.501.126
Ekspor LN	6.266.265	6.495.282	7.436.959	8.749.632	8.970.892
Impor LN	5.066.145	5.922.732	6.540.719	7.206.068	6.934.236
Net Ekspor Antar daerah	-20.819.021	- 21.290.602	- 25.747.135	-28.469.631	-31.188.901
<b>PDRB</b>	<b>101.447.650</b>	<b>110.098.341</b>	<b>119.172.906</b>	<b>129.877.458</b>	<b>141.400.183</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY

**Tabel 0-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran, 2015-2019 (%)**

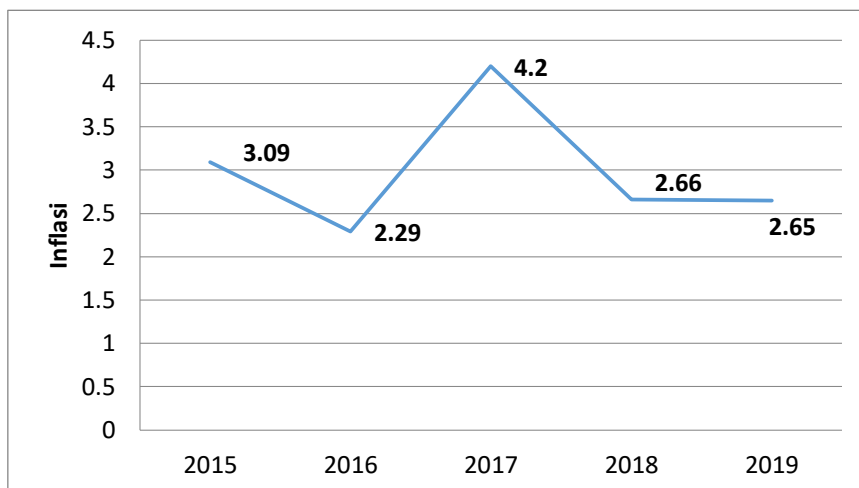
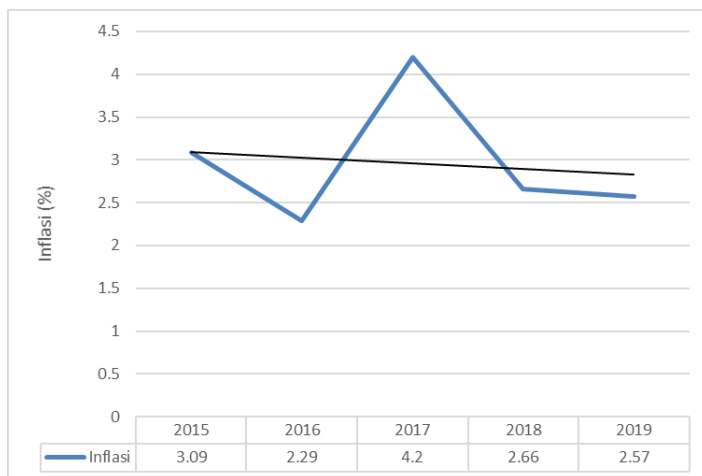
Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi RT	67,75	67,66	68,55	66,80	65,39
Konsumsi LNPRT	3,13	2,93	3,15	3,15	3,26
Konsumsi pemerintah	16,97	16,76	16,64	16,44	15,88
PMTB	30,36	30,39	31,17	33,24	35,02
Perubahan Inventori	1,14	1,18	1,15	1,11	1,06
Ekspor LN	6,18	5,9	6,24	6,74	6,34

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Impor LN	4,99	5,38	5,49	5,55	4,90
Net Ekspor Antar daerah	-20,52	-19,44	-21,60	-21,92	-22,06
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi DIY

### 3.4. Inflasi

yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2015-2019, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.29%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,57%.

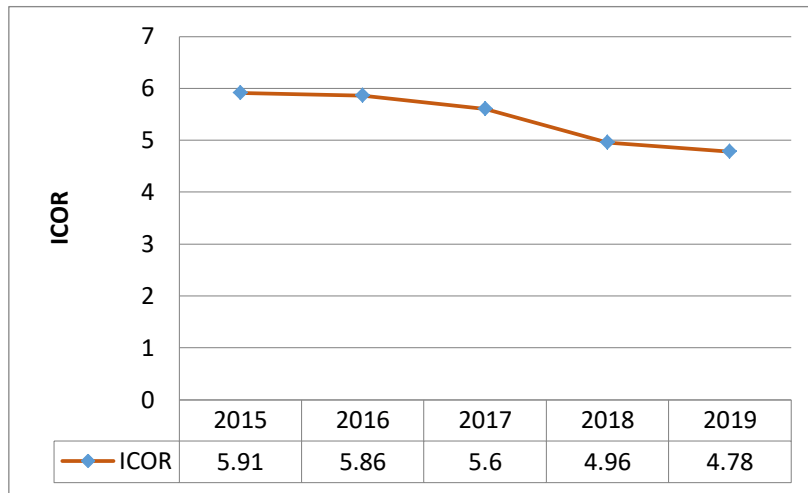
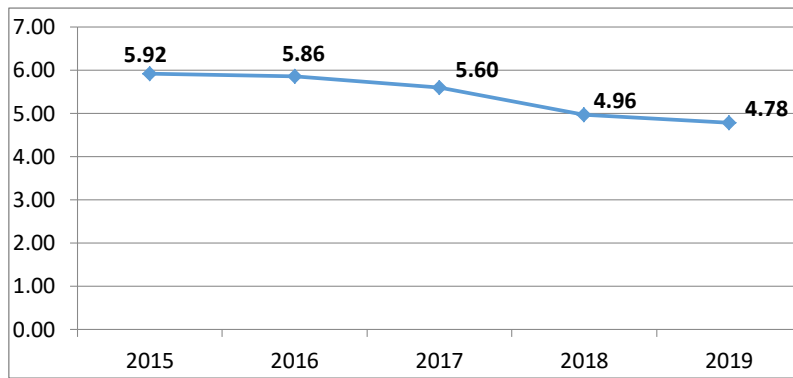


Sumber: BPS Provinsi DIY

**Gambar 0-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2015-2019**

### 3.5. ICOR

Pada periode 2015-2019, nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan trend yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan meningkat efisiensinya. Nilai ICOR turun dari 5.92 di tahun 2015 menjadi 4,78 di akhir periode.



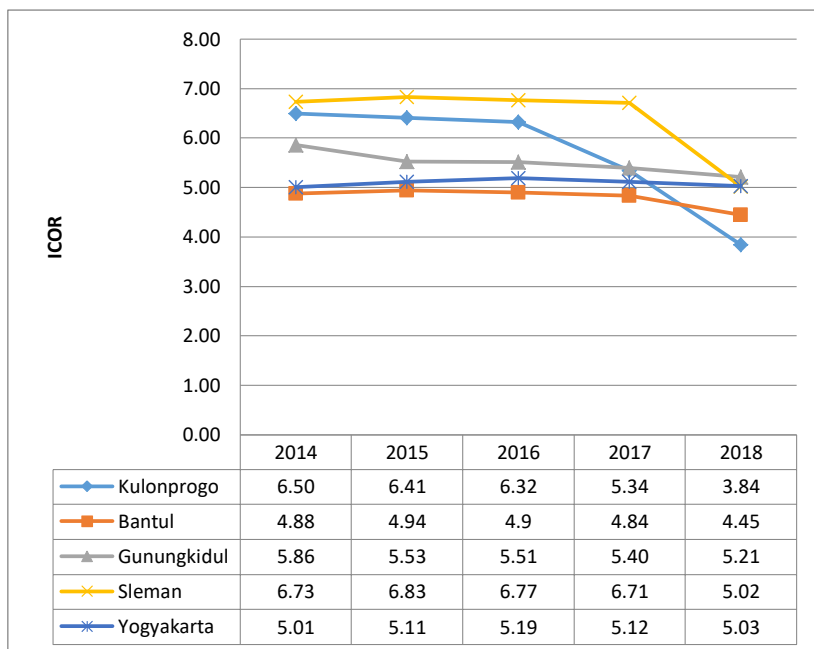
Sumber: BPS Provinsi DIY

Keterangan: Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

#### **Gambar 0-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB + Perubahan Inventori), 2015-2019**

Menurut kabupaten/kota di DIY, pada periode 2014 sampai 2018 nilai ICOR tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sleman diikuti Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Kota Yogyakarta, dan terendah Kabupaten Bantul. Kabupaten Sleman memiliki nilai ICOR relatif tinggi dari kabupaten/kota lainnya karena jenis investasi yang ada bersifat padat modal dan lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan minum. Sementara itu, Kabupaten Bantul memiliki nilai ICOR yang relatif rendah karena lebih didominasi oleh sektor pertanian, industri kecil/rumah tangga, dan jasa akomodasi non-bintang.





Sumber : BPS Provinsi DIY

**Gambar 0-8 Perkembangan ICOR (PMTB + Perubahan Inventori) Kabupaten/Kota di DIY, 2015-2018**

### 3.6. Ketenagakerjaan

519 me 2015 -2019 dapat Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 0-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.106.908	2.107.286	2.203.920
Jumlah Penganggur Terbuka	80.245	57.036	64.019	73.350	69.170
TPT	4,07	2,72	3,02	3,35	3,14
Tahun	2015	2016	2017	2018	
Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.117.190	2.191.740	
Pengangguran Terbuka	48.664	57.036	64.020	73.350	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,43	2,71	3,02	3,35	

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

19 203.92096.634 107.286penurunan69.17019 dari 73.350 di tahun sebelumnya. b di tahun 2019.Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.252.361 orang dan meningkat sebanyak 60.620 orang dari 2.191.740 orang dari tahu sebelumnya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan perkiraan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 75.229 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,56% dari tahun 2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY

kurang berpengaruh pada tingkat pengangguran di DIY. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi DIY cenderung meningkat namun pengangguran terbuka juga mengala

### 3.7. Kemiskinan

01,76 Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 120,98 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

**Tabel 0-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2015-2019**

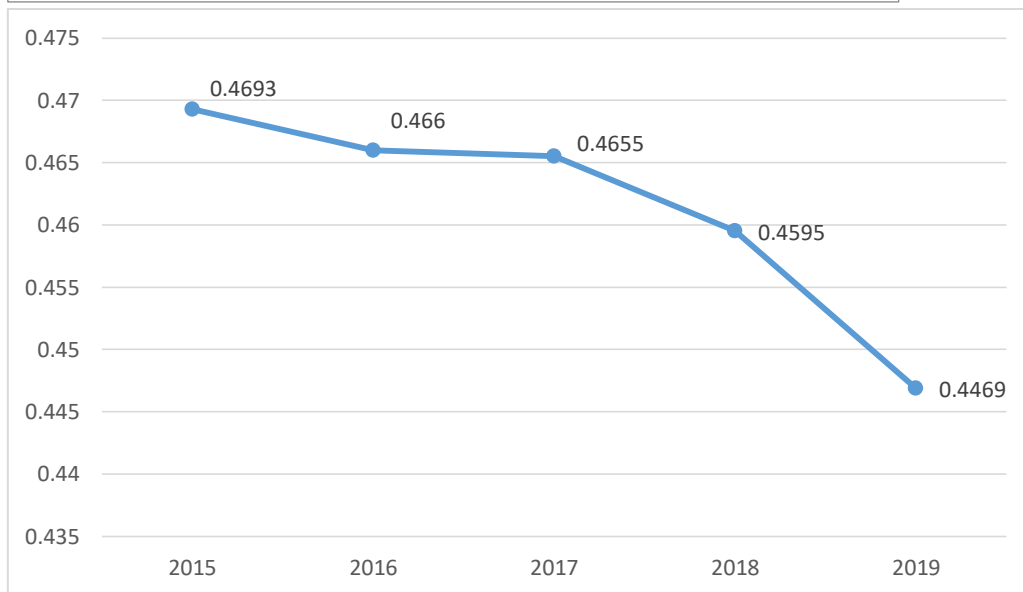
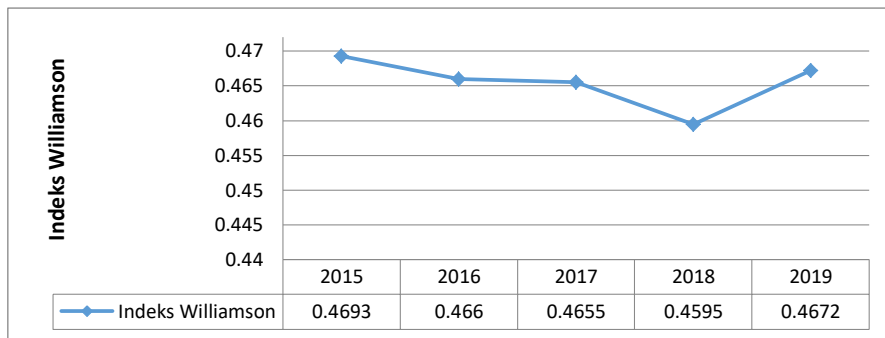
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	448.47
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.70

Sumber: BPS Provinsi DIY

70 Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,26% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

### 3.8. Ketimpangan Regional

Ntahun 25-219 penurunan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin merata.



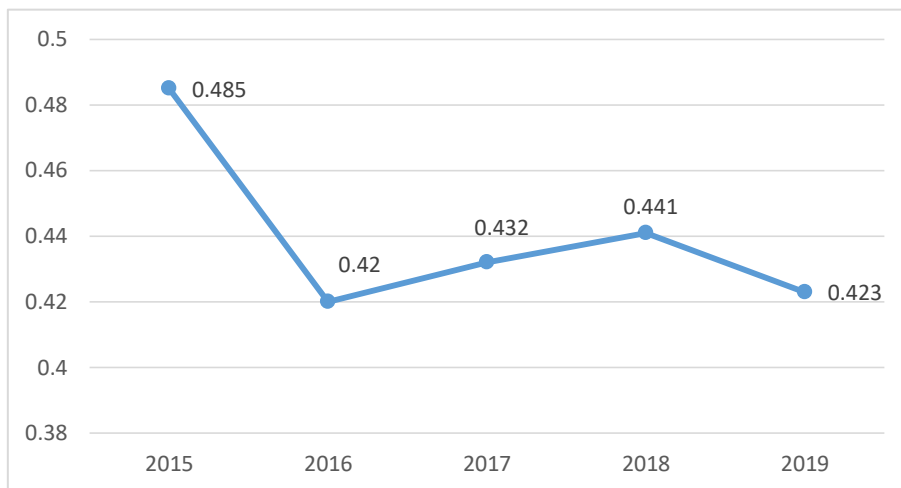
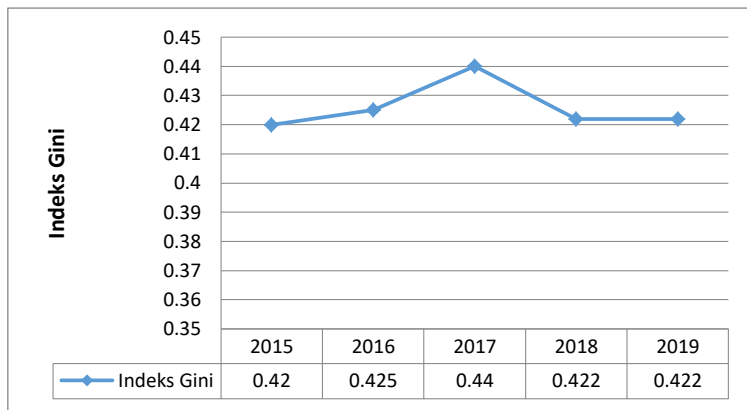
Sumber: BPS Provinsi DIY

**Gambar 0-9 Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019**

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) di masing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah terse

### 3.9. Ketimpangan Pendapatan

menurun menjadi 3. Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,015 poin dari 0,425 di tahun 2016. Pada tahun 2019, Rasio Gini relatif sama dengan tahun sebelumnya.



BPS Provinsi DIY Sumber : Bappeda 2018

Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

Gambar 0-10 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2015 - 2019

## BAB IV

### PROYEKSI INDIKATOR MAKROEKONOMI TAHUN 2020 DAN 2021

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia diperkirakan mengalami kontraksi dan terjadinya beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemic global Covid 19. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2020 dan 2021 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2020 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi. Skenario optimis didasarkan pada pandemi berakhir bulan Juni 2020, Skenario moderat didasarkan pada akhir pandemi pada bulan Agustus 2020 dan bulan Desember untuk skenario pesimis;
2. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2021 didasarkan pada perkembangan proses mitigasi kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global;
3. Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, penyediaan akomodasi dan makan minum dan transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor diperkirakan tidak banyak terganggu karena ada potensi perpidahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;
4. Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga karena melemahnya daya beli dan praktek social/physical distancing, penurunan ekspor karena melemahnya daya beli internasional.

2019 dan 2020. Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 0-1      Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2020 dan 2021**

1.		0,5	2,3	3,1	4,2	5,2	6,0
----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## Olahan

### 4.1. Pertumbuhan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Penundaan pelaksanaan hampir semua proyek fisik pemerintah menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan sektor konstruksi yang pada tahun sebelumnya menjadi penyumbang pertumbuhan tinggi di DIY. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan -8% untuk skenario pesimis, -6,1% untuk skenario moderat dan -4% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 1,6% untuk skenario pesimis, 2,18% untuk skenario moderat dan 4,2% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2,1% untuk skenario pesimis, 4,1% untuk skenario moderat dan 5,6% untuk skenario optimis. Selama pandemi Covid 19, diperkirakan terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke DIY yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan -0,5% untuk skenario pesimis, -0,2% untuk skenario moderat dan 3% untuk skenario optimis. Melemahnya aktivitas pariwisata dan perdagangan menyebabkan pelemahan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh -0,4% untuk skenario pesimis, -0,2% untuk skenario moderat dan 3,1% untuk skenario optimis.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

dipengaruhi oleh pelaksanaan mitigasi dampak Covid 19 di tahun 2020 dan kondisi perekonomian nasional maupun global. Mitigasi pasca pandemi mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dalam melakukan berbagai macam program dan kegiatan intervensi meskipun kemampuan fiskal masih terkendala penerimaan pemerintah akibat dampak epidemi di tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat 1,5% untuk skenario pesimis, 2,92% untuk skenario moderat dan 3,12% untuk skenario optimis. Daya beli masyarakat juga meningkat dengan perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong pertumbuhan pengeluaran rumah tangga meningkat 3,1% untuk skenario pesimis, 5,78% untuk skenario moderat dan 6,67% untuk skenario optimis. Perbaikan kondisi nasional dan internasional diperkirakan dapat meningkatkan kinerja yang signifikan pada sektor pariwisata dan perdagangan luar daerah maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum diperkirakan 4,9% untuk skenario pesimis, 7,31% untuk skenario moderat dan 8,35% untuk skenario optimis. Sementara itu, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2,1% untuk skenario pesimis, 4,1% untuk skenario moderat dan 5,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 3,9% untuk skenario pesimis, 4,59% untuk skenario moderat dan 6,39% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor

transportasi dan pergudangan yang tumbuh 4,5% untuk skenario pesimis, 7,31% untuk skenario moderat dan 8,35% untuk skenario optimis. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 diperkirakan tumbuh sebesar 5,99%. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,20% yang didorong oleh pertumbuhan sektor konstruksi yang didominasi oleh dampak pembangunan YIA dan beberapa proyek fisik besar, namun telah selesainya proyek-proyek tersebut di tahun 2019 menyebabkan peran pertumbuhan sektor konstruksi mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diperkirakan turun dibanding tahun 2018 dan 2019. Pertumbuhan sebesar 5,99% di tahun 2020 menyebabkan nilai PDRB ADHK di tahun berkaitan menjadi sebesar Rp110.237.702 juta.

#### ○ **Inflasi**

Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi Covid 19. Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang menurun akan berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2 sampai 3,2% dengan rincian disajikan pada Tabel 3-5. Perbaikan kondisi perekonomian tahun 2021 akan meningkatkan daya beli masyarakat namun tidak akan meningkatkan harga-harga secara umum karena dibarengi dengan peningkatan penawaran komoditas-komoditas dan upaya efektif dari TPID yang selama ini dapat menekan kenaikan tingkat harga. Tingkat inflasi di DIY menunjukkan tren yang menurun selama tiga tahun terakhir ini. Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja TPID yang baik tersebut akan mendorong tetap rendahnya tingkat kenaikan harga umum di DIY dan angka inflasi cenderung terus menurun sampai tahun 2020 menjadi sekitar

#### ○ **ICOR**

Rincian proyeksi ICOR tahun 2020 dan 2021 untuk tiga jenis skenario disajikan pada Tabel 3-5. selama tahun 2020 dan 2021 peningkatan dibandingkan periode sebelumnya telah dengan ICOR di bawah 5 ninterdampak Covid menurunnya kinerja sektormasalah suplai bahan baku. Tingkat efisiensi produksi diharapkan dapat meningkat di tahun 2021 seiring dengan meningkatnya kinerja sektor transportasi dan lancarnya suplai bahan baku. Nilai ICOR DIY cenderung senantiasa menunjukkan penurunan yang mengindikasikan adanya kenaikan efisiensi proses produksi. Peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh peningkatan kualitas prasarana transportasi dengan membaiknya kualitas jalan di hampir seluruh

daerah. Perbaikan jalan yang dilaksanakan setiap tahun terutama di dua tahun terakhir untuk mengantisipasi dampak keberadaan YIA akan mendorong semakin membaiknya tingkat efisiensi produksi dan akan menurunkan nilai ICOR menjadi 4,59 di tahun 2020 yang menurun dari 4,78 di tahun 2019

#### ○ **TPT**

20 diperkirakan secara signifikan Hal ini didorong oleh melemahnya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak epidemi Covid 19. Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Penurunan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada potensi pengangguran yang meningkat mengingat sekitar 50% dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. D21 diperkirakan sektor yang telah menunjukkan perbaikan kinerja di tahun 2021. Proyeksi rinci TPT tahun 2020 dan 2021 untuk tiga kelompok skenario disajikan pada Tabel 3-5. Meskipun TPT menurun namun TPT belum dapat mencapai tingkat di tahun 2019 yang berada di bawah 3% mengingat kondisi perekonomian lokal, nasional maupun global belum mendekati kondisi sebelum pandemic Covid 19 seperti kemungkinan masih melemahnya minat berwisata antar daerah atau antar negara dan daya beli masyarakat negara lain akibat pandemi.

Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 sempat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun di tahun 2020, tingkat pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 0,01 poin. Penurunan tersebut didorong oleh terbukanya lapangan kerja dari peningkatan aktivitas berbagai sektor terdampak oleh keberadaan dan operasionalisasi YIA. Semakin meningkatnya peluang kerja di tahun 2020 akan mendorong TPT turun menjadi 3,34% dari sekitar 3,35% di tahun sebelumnya

#### ○ **Kemiskinan**

Proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2020 dan 2021 disajikan secara detail pada Tabel 3-5. 2020 dan meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 yang telah turun menjadi 11,70% tingkat melambat menurun terutama di tahun 2020 serta meningkatnya tingkat pengangguran Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan dapat menurun kembali sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian dengan meningkatnya penyerapan angkatan kerja terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta adanya peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak epidemi yang terutama ditujukan kepada warga miskin. Dengan mengasumsikan kontribusi kelompok masyarakat menengah ke bawah pada masa sebelum dan sesudah pandemi Covid 19, tingkat kemiskinan pasca pandemi di tahun 2021 tidak dapat mencapai tingkat yang telah dicapai di tahun 2019. Pengalaman historis penurunan tingkat kemiskinan sampai tahun 2019 adalah sekitar 3,42% sedangkan kenaikan tingkat



kemiskinan pada tahun 2020 adalah 8,57%, sehingga kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan di tahun 2021 sangat kecil karena kenaikan kemiskinan akibat pandemi jauh lebih tinggi dari rata-rata penurunan yang telah dicapai sebelum pandemi.

#### ○ **Indeks Gini**

dan 2021 meningkat. Hal ini disebabkan oleh terdampaknya kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini terutama bekerja sebagai buruh atau karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak epidemi Covid 19 seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku. Akhirnya tingkat pengangguran yang meningkat ini akan menurunkan daya beli masyarakat serta dan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Proyeksi rinci atas tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini tersajikan pada Tabel 3-5. Tingkat ketimpangan pendapatan di tahun 2021 tetap di atas capaian terakhir tahun 2019 mengingat kondisi tahun 2020 telah menyebabkan kenaikan sebesar 13,79% dari tahun 2019 yang sulit untuk diturunkan dengan kondisi kontribusi masyarakat dari kelompok menengah ke bawah di perekonomian DIY yang relatif tidak berubah dibandingkan masa sebelum pandemi dengan penurunan Indeks Gini hanya terjadi di tahun 2019 sebesar 4,08%.

#### ○ **Indeks Williamson**

Dampak epidemi Covid 19 pada berbagai pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan menyebabkan inisiatif untuk memperbaiki ketimpangan wilayah menghadapi masalah. Berbagai pembangunan fisik terutama proyek mega selama ini diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal, sebagai contoh pembangunan dan operasionalisasi YIA diharapkan dapat meningkatkan dinamika perekonomian khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan berbagai daerah tertinggal di wilayah lain. Pada tahun 2020, proyek-proyek pembangunan maupun pengembangan wilayah ditunda sehingga mendorong ketimpangan antar wilayah meningkat. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Melemahnya sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada ketimpangan antar wilayah.

Ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson tahun 2020 mengalami penurunan di tahun 2020 dengan indeks sebesar 0,4671 yang menurun dari 0,4672 pada tahun sebelumnya. Pengurangan ketimpangan wilayah didorong oleh dampak keberadaan dan operasionalisasi YIA yang dapat di manfaatkan oleh daerah lain untuk meningkatkan aktivitas ekonominya. Penurunan ketimpangan hanya sekitar 0,001 poin mengingat jangka waktu tahun bersangkutan belum panjang dibandingkan dengan mulai beroperasinya bandara baru. Unit-unit usaha yang tercipta belum menunjukkan kinerja yang memuaskan karena masih relatif baru. Belum berkembangnya unit usaha baru belum dapat mendorong *multiplier effect* lanjutan ke sektor lain maupun penyerapan tenaga kerja di daerah setempat sehingga belum dapat menunjukkan peningkatan pendapatan di daerah-daerah yang mulai berkembang. Pada tahun 2021, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2020 dan 2021 disajikan pada Tabel 3-5. Dengan kondisi kontribusi perekonomian di masing-masing wilayah terhadap perekonomian DIY yang relatif tetap pada masa sebelum dan sesudah pandemi, ketimpangan wilayah di tahun 2021 menurun namun tingkat ketimpangannya tidak dapat mencapai tingkat pada masa sebelum pandemi. Hal itu disebabkan kenaikan ketimpangan antara wilayah di tahun 2020 sebesar rata-rata 6,63% sulit untuk diturunkan dengan penurunan rata-rata sesuai dengan pengalaman historis sebelumnya yaitu sebesar 1,63%.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari analisis di Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan terutama terkait dengan proyeksi perkembangan beberapa indikator makro ekonomi DIY di bawah ini.

1. Tren PDRB dan LPE 2015 - 2019 mengalami kenaikan namun proyeksi di tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan proyeksi tahun 2021 meningkat kembali;
2. Tren dan proyeksi inflasi mengalami penurunan;
3. Tren dan proyeksi jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan. Tren penduduk bekerja pun mengalami peningkatan meskipun proyeksi tahun 2020 mengalami penurunan dan proyeksi 2021 akan meningkat kembali. Tren tingkat pengangguran menurun sedangkan proyeksi tahun 2020 meningkat dan akan menurun kembali di tahun 2021;
4. Tren ICOR mengalami penurunan, sedangkan proyeksi tahun 2020 akan meningkat tapi kemudian menurun kembali di tahun 2021.

5. Tren Indeks Gini dan Indeks Williamson mengalami penurunan, namun proyeksi kedua nya akan meningkat di tahun 2020 namun kemudian menurun di tahun 2021.
6. Tren kemiskinan mengalami penurunan, sedangkan proyeksi tahun 2020 meningkat dan kemudian menurun kembali di tahun 2021.

Penurunan kinerja perekonomian yang diindikasikan dengan pemburukan semua variabel makro ekonomi di tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid 19 yang mempengaruhi hampir semua sektor perekonomian. Meskipun demikian, harapan untuk kembali mencapai kinerja perekonomian yang lebih baik diproyeksikan terjadi di tahun 2021 dengan dibarengi dengan meningkatnya semua aktivitas perekonomian meskipun kenaikan tersebut belum dapat mencapai kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019.

## **6.2. Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal di bawah ini.

1. Pemerintah DIY lebih memberikan perhatian upaya antisipasi selama terjadi pandemi dan mitigasi pasca pandemi agar aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan dan akan membaik ketika masa pandemi berakhir;
2. Pemerintah DIY perlu mencermati perkembangan kondisi perekonomian global mengingat dampak pandemi selama ini telah mempengaruhi kinerja perekonomian hampir di semua negara di dunia. Hal itu ditujukan untuk mencermati perkembangan pasar internasional terkait dengan upaya peningkatan ekspor maupun upaya mengundang wisatawan asing ke DIY. Perlunya upaya untuk menggiatkan pasar domestik untuk mengantisipasi kondisi perekonomian dunia yang belum stabil agar aktivitas masyarakat dapat meningkat kembali;
3. Upaya penanganan, mitigasi maupun intervensi lainnya kepada masyarakat pasca pandemi dapat diarahkan pada peningkatan kemampuan daya beli dan aktivitas produktif masyarakat agar perekonomian dapat bangkit kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. (2019). *Analisis Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dan Badan Pusat Statistik DIY. (2019). *Analisis Produk Domestik Regional Bruto 2016-2018*.
- Badan Pusat Statistik DIY, *Daerah istimewa dalam Angka*, berbagai edisi
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, berbagai edisi
- Jeffrey G. Williamson (1965). *Economic Development and Cultural Change*. Vol. 13, No. 4, Part 2 (Jul., 1965), pp. 1-84
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Layard, R. dan S. Nickell. (1986). *Unemployment in Britain*. *Economica* 53(210): S121-S169.
- Lind, D.A., W.G. Marchal, dan S.A. Wathen. (2012). *Statistical Techniques in Business and Economics*. 15<sup>th</sup> ed. McGraw-Hill. New York.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Macroeconomics*, 6th Edition. Worth Publishers, Inc., New York, NY
- Meier, G.M. (1995). *Leading issues in economic development*, 6<sup>th</sup> ed. Oxford: Oxford University Press
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Samuelson, Paul A and Nordhaus, W D. (2005). *Economics*. Ed 18<sup>th</sup>. McGraw-Hill. New York.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11 ed.). Singapore: Addison Wesley.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.